

**BIRO INSTALATIR :
STUDI TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMAKAI
TENAGA LISTRIK
di CV. Cahaya Teknik Kabupaten Karanganyar**

Naskah Publikasi Skripsi



Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas–Tugas dan Syarat–Syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh :

YULIANTI

NIM. C 100 080 040

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2012

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada

Hari : Selasa

Tanggal : 17 Juli 2012

Dewan Penguji

Ketua : Kelik Wardiono, S.H., M.H

Sekretaris : Darsono, S.H

Anggota : Nuswardani, S.H.,SU

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Muchamad Iksan, S.H., M.H)

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yulianti

NIM : C 100 080 040

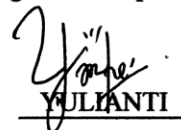
Alamat : Balen 03/01, Bendungan, Cawas, Klaten

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasi orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, Juli 2012

Yang membuat pernyataan,


YULIANTI

NIM. C 100 080 040

ABSTRAK

Yulianti. C.100.080.040. *Studi Tentang Perlindungan Hukum Bagi Pemakai Tenaga Listrik*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Adapun tujuan Untuk mendiskripsikan konstruksi dari hubungan hukum antara pemakai tenaga listrik dengan Cahaya Teknik Kab. Karanganyar sebagai Biro Instalatir serta Untuk mendiskripsikan bentuk-bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh Biro Instalatir apabila terjadi suatu kelalaian yang mengakibatkan kerugian pada konsumen dan Untuk mendiskripsikan upaya penyelesaian yang ditempuh diluar pengadilan oleh Biro Instalasi dan konsumen selaku pemakai jasa, akibat dari kelalaian yang mengakibatkan kerugian pada pemakai tenaga listrik.

Dalam laporan penelitian ini penulis membahas mengenai Studi Tentang Perlindungan Hukum Bagi Pemakai Tenaga Listrik, dalam pelaksanaan perjanjian pemasangan instalasi listrik oleh Biro Instalatir seringkali menimbulkan kelalaian yang dapat mengakibatkan kerugian pada konsumen. Untuk itu perlu diketahui bagaimana konstruksi hubungan hukum yang terjadi antara konsumen dengan Biro Instalatir, bagaimana bentuk-bentuk tanggungjawab dari Biro Instalatir apabila terjadi kelalaian yang mengakibatkan kerugian pada konsumen sebagai pemakai tenaga listrik serta bagaimana upaya penyelesaian yang ditempuh oleh kedua belah pihak dalam penyelesaian kasus tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian bentuk-bentuk tanggungjawab Biro Instalatir ada tiga yaitu : pertama bertanggungjawab atas instalasi Listrik Pelanggan yang telah kami pasang pada bangunan/persil, kedua bertanggungjawab sepenuhnya atas segala akibat hukum yang timbul terhadap kesalahan teknis dengan disambungkannya / dimasukkannya tegangan listrik dari Instalasi PT. PLN (Persero) ke Instalasi pelanggan pada bangunan, kemudian yang ketiga kelalaian dalam hal teknis yaitu Tanggungjawab CV. Cahaya Teknik didalam Kelalaian sebelum pemasangan dan Tanggungjawab CV. Cahaya Teknik didalam Kelalaian Setelah pemasangan serta pemberian santuan apabila terjadi kebakaran yang diakibatkan oleh aliran arus listrik yang telah dipasang oleh Biro Instalasi Listrik. Didalam pemberian ganti kerugian yang dilakukan oleh Biro Teknik Listrik kepada konsumen tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam penggantian kerugian serta sudah sesuai dengan doktrin yang mengatur tentang ganti kerugian tersebut. Kemudian didalam penyelesaian sengketa diluar Pengadilan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dengan menggunakan jalur Negosiasi atau Perdamaian. Dalam penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh kedua belah pihak sesuai dengan prosedur yang terdapat didalam peraturan Perundang-undangan maupun berasal dari doktrin-doktrin yang berkaitan. Bahwa didalam konstruksi hubungan hukum yang terjadi antara Biro Teknik Listrik dengan konsumen tersebut didalam perjanjian antara kedua belah tersebut sudah terjadi kesesuaian didalam Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai konstruksi hubungan hukum tersebut maupun didalam doktrin-doktrin yang berkaitan dengan konstruksi hubungan hukum.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pemakai Tenaga Listrik, Biro Instalasi Listrik.

ABSTRACT

Yulianti. C.100.080.040. *Studies Legal Protection For Electrical Power Users. Thesis. Faculty of Law of Surakarta Muhammadiyah University. The purpose of describing the construction of the legal relationship between the users of electricity with Cahaya Teknik Karanganyar District installers as well as bureau forms to describe the responsibilities of installers conducted by the bureau in the event of a failure that resulted in losses to consumers and to describe the efforts taken outside order court by the agency as the installation and customer service users, the result of negligence resulting in loss of electrical power to the wearer.*

In this study the authors report discusses the Protection of Legal Studies for Power Users, in the implementation of the agreement by the agency electrical installation installers often give rise to negligence which may result in harm to consumers. For that we need to know how the legal construction that occurs between the consumer and installer agency, how the forms of responsibility of the bureau installer negligence that resulted in the event of loss to consumers as users of electric power and how the remedies pursued by both parties in resolving the case.

Based on research results forms the responsibility of the installer, there are three bureaus, namely: the first is responsible for the installation of electricity customers that we have put in buildings or parcels, both fully responsible for all legal consequences arising out of a technical error with the connected or tension inclusion electricity from installation of PT. PLN (Persero) to the customer installation in buildings, then the third one in terms of technical negligence is the responsibility of CV. Cahaya Teknik at the negligence of responsibility prior to installation and CV. Cahaya Teknik in negligence after the installation and sympathize care administration case of fire caused by electrical current flow that has been installed by the electrical installation firm. In the awarding of damages done by the electrical engineering firm to the consumer is in compliance with laws and regulations applicable in restitution and is in conformity with the doctrine that governs such compensation. Then in the settlement of disputes out of court by both parties by way of negotiation or peace. In a dispute resolution conducted by both parties in accordance with prosuder contained in the legislation as well as from related doctrines. That in the construction of the legal relationship between electrical engineering firm with the consumer in the agreement between the two sides are already there is a match in the laws and regulations governing the construction of relationships the law or in the doctrines associated with the construction of relationships the law.

Key Words: Legal Protection, Use of Electric Power, Bureau of Electrical Installations

BIRO INSTALATIR :
STUDI TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMAKAI TENAGA
LISTRIK
di CV. Cahaya Teknik Kabupaten Karanganyar
oleh : Yulianti (C 100 080 040)

A. Pendahuluan

Latar belakang dari Penelitian ini adalah Dalam praktek seringkali dijumpai bahwa pelanggan (konsumen) kurang memperhatikan terhadap isi perjanjian pemasangan Instalasi Listrik, Bagi mereka yang terpenting adalah layanan pemasangan Instalasi Listrik segera terealisasi, artinya segera menyala. Konsumen umumnya menganggap perjanjian pemasangan instalasi itu selesai dan konsumen tidak menghiraukan kemungkinan-kemungkinan kelalaian yang akan terjadi pada saat pemasangan Instalasi Listrik. Didalam pelaksanaan perjanjian konsumen tidak menghiraukan mengenai material instalatir yang digunakan didalam pemasangan instalasi listrik sehingga apabila didalam pemasangan instalasi listrik apabila terjadi kesalahan atau ketidaksesuaian maka konsumen itu sendiri yang harus menanggung resiko atas kerugian tersebut. Bahwa dalam perjanjian instalasi listrik konsumen seolah-olah dipaksa karena dalam hal ini perjanjian tersebut sebelumnya sudah dibuat oleh Biro Instalatir sehingga konsumen dipaksa untuk menyetujui daripada perjanjian tersebut. Terkadang dari Biro instalatir listrik melakukan kelalaian yaitu menyangkut kelalaian dalam keterlambatan pemasangan instalasi listrik, alat-alat, dan bahan-bahan yang digunakan dalam pemasangan instalasi listrik, dan jaringan listrik yang dipasangkan sehingga dalam hal ini konsumen atau pelanggan merasa dirugikan.

Mengenai rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah konstruksi dari hubungan hukum antara pemakai tenaga listrik dengan Cahaya Teknik Kab. Karanganyar sebagai Biro Instalatir, Bagaimana bentuk-bentuk tanggung jawab Cahaya Teknik Kab. Karanganyar sebagai Biro Instalasi, apabila terjadi kelalaian pada pemasangan instalasi listrik yang mengakibatkan kerugian pada pemakai tenaga listrik, dan Bagaimana upaya-upaya penyelesaian di luar Pengadilan akibat terjadinya kelalaian pada pemasangan instalasi listrik yang mengakibatkan kerugian pada pemakai tenaga listrik.

Berdasarkan dengan permasalahan tersebut diatas maka manfaat yang ingin dicapai : Manfaat Teoritis yaitu Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi ilmiah bagi civitas akademika khususnya untuk menunjang proses belajar mengajar di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kemudian untuk Manfaat Praktis yaitu Bagi Masyarakat (khususnya konsumen dalam pemasangan listrik) : Karya ini diharapkan memberikan informasi berharga kepada masyarakat konsumen yang akan memasang instalasi listrik khususnya bentuk-bentuk tanggungjawab Biro Instalatir dan upaya tuntutan ganti kerugian yang akan diajukan ketika konsumen dirugikan akibat kelalaian yang dilakukan oleh kontraktor dalam perjanjian pemasangan instalasi listrik. Bagi kontraktor Listrik : Penelitian ini dapat memberikan informasi hukum perjanjian kepada kontraktor listrik khususnya hal yang menyangkut bentuk-bentuk tanggungjawabnya secara

seimbang dalam hal terjadi suatu kelalaian dan upaya penyelesaian diluar Pengadilan yang dapat ditempuh.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dalam melakukan penelitian menggunakan metode pendekatan Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan non-doktrinal yang kualitatif¹. Hal ini disebabkan di dalam penelitian ini, hukum tidak hanya dikonsepsikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan meliputi pula lembaga-lembaga dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam masyarakat. Bahwa lokasi penelitian yang dipilih adalah CV.Cahaya Teknik Kabupaten Karanganyar. Tipe kajian dalam penelitian ini lebih bersifat deskriptif, karena bermaksud menggambarkan secara jelas tentang permasalahan yang akan dikaji didalam penelitian yang akan dilakukan. Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis data : Data Primer yaitu sumber data utama, yang berwujud tindakan-tindakan sosial dan kata-kata², kemudian data Sekunder yaitu sumber-sumber penunjang lainnya yaitu peraturan perundang-undangan (hukum positif Indonesia), artikel ilmiah, buku-buku literatur, dokumen-dokumen resmi, arsip dan publikasi dari lembaga-lembaga yang terkait. Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, akan dikumpulkan melalui tiga cara, yaitu : melalui wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Instrumen yang digunakan adalah

¹ Soetandyo Wignjosoebroto, *Silabus Metode Penelitian Hukum*, Surabaya : Program Pascasarjana Universitas Airlangga, tt. Hal. 1 dan 3

² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya Offset, Bandung, hal. 112

adalah peneliti sendiri, sedangkan instrumen penunjangnya berupa, rekaman/catatan harian di lapangan, daftar pertanyaan dan Hand Phone yang digunakan untuk merekam pada saat wawancara. Kemudian untuk teknik pengumpulan data adalah Data yang telah terkumpul dan telah diolah akan dibahas dengan menggunakan metode analisis kualitatif³. Dalam hal ini analisis akan dilakukan secara berurutan antara metode analisis domain, analisis taksonomis, dan analisis komponensial.

B. Konstruksi hubungan hukum Bagaimanakah konstruksi dari hubungan hukum antara pemakai tenaga listrik dengan Cahaya Teknik Kab. Karanganyar sebagai Biro Instalatir

1. Obyek dalam Perjanjian

Bahwa *onderwerp* dari *verbintenis* ialah “Prestasi”. Kreditur berhak atas prestasi yang diperjanjikan, dan debitur wajib melaksanakan prestasi dimaksud. Kalau demikian, intisari atau hakikat perjanjian tiada lain dari pada prestasi. Jika undang-undang telah menetapkan “subyek” perjanjian, yaitu pihak kreditur yang berhak atas prestasi dan pihak debitur yang wajib melaksanakan prestasi, maka intisari atau “obyek” dari perjanjian ialah prestasi itu sendiri⁴. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa didalam obyek perjanjian antara CV. Cahaya Teknik dengan Konsumen adalah pemasangan instalasi listrik pada sebuah rumah tinggal dengan kemampuan instalasi 1300 VA. Bahwa obyek daripada perjanjian pemborongan ini adalah pelaksanaan suatu prestasi pemasangan

³ Sanapiah Faisal, *Op. Cit.* hal. 70 dan 99; Bandingkan dengan James P. Spradley, *The Ethnographic Interview*, Dialihbahasakan oleh Misbah Zulfah Elizabeth, dengan judul *Metode Etnografi*. Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, 1998.

⁴ Yahya Harahap, 1986, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, hal 10.

instalasi listrik. Dalam hal ini seorang kontraktor melakukan prestasinya atau kewajibannya sesuai dengan perjanjian di dalam pemasangan instalasi listrik dan juga menyediakan seluruh material yang dibutuhkan didalam suatu instalasi listrik. Seluruh material serta bahan-bahan yang disediakan oleh kontraktor atau pemborong tersebut sudah disesuaikan dengan standar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku didalam pemasangan instalasi listrik.

Bahwa maksud dari Subyek disini adalah tentang siapa-siapa yang tersangkut dalam suatu perjanjian. Menurut Pasal 1315 KUPerdata bahwa: “ pada umumnya tiada seorangpun dapat mengikat diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji, melaikan untuk dirinya sendiri”.

Suatu perjanjian hanya meletakkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara para pihak yang membuatnya. Orang-orang lain adalah pihak ketiga yang tidak mempunyai sangkut paut dengan perjanjian tersebut⁵. Dalam hal ini pihak pihak yang terdapat didalam perjanjian pemborongan ini adalah konsumen atau pemakai tenaga listrik dan Biro teknik Listrik.

2. Hak dan Kewajiban kedua belah pihak

a. Hak dan Kewajiban Konsumen

Hak Pemakai Tenaga Listrik

Didalam Pasal 1608 KUHPerdata disebutkan bahwa :

⁵ Subekti, 1985, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, hal 29.

“Hak dari konsumen adalah jika suatu pekerjaan dikerjakan sepotong demi sepotong atau seukuran, maka pekerjaan itu dapat diperiksa sebagian demi sebagian pemeriksaan tersebut dianggap terjadi untuk semua bagian yang telah dibayar, apabila pihak yang memborongkan tiap-tiap kali membayar si pemborong menurut imbalan dari apa yang telah selesai dikerjakan”.

Dalam hal hak dari konsumen sendiri sudah sesuai dengan perjanjian pemborongan yang dilakukan oleh kedua belah pihak karena konsumen berhak atas pekerjaan yang dilakukan oleh Biro Instalasi listrik dan memeriksa apakah sudah sesuai dengan keinginan dari konsumen ataupun melakukan kelalaian.

Kewajiban Pemakai Tenaga Listrik

a) Kewajiban Pemakai Tenaga Listrik

Mengenai kewajiban dari pemakai Tenaga Listrik terdapat didalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1989 tentang Penyediaan Pemanfaatan dan Pemakaian Tenaga Listrik Pasal 26 ayat (3) yaitu :

Masyarakat yang telah mendapat tenaga listrik mempunyai kewajiban :

(1) Melaksanakan pengamanan terhadap bahaya yang mungkin timbul akibat pemanfaatan tenaga listrik.

(2) Menjaga dan memelihara keamanan instalasi ketenagalistrikan.

(3) Menggunakan tenaga listrik sesuai dengan peruntukannya.

Kewajiban dari konsumen atau pemakai tenaga listrik tersebut sudah sesuai karena konsumen bisa menjaga dan memelihara instalasi listrik dan apabila ingin melakukan penggantian atau hal-hal yang berhubungan dengan ketenagalistrikan diharapkan menghubungi Biro Instalasi Listrik yang memasang instalasi tersebut.

b. Hak dan Kewajiban Kontraktor

a) Hak Kontraktor

Didalam Pasal 1607 KUHPerdara mengenai hak dari pemborong disebutkan bahwa:

“Jika didalam hal yang tersebut dalam pasal yang lalu, musnahnya pekerjaan itu terjadi diluar sesuatu kelalaian dari pihak si pemborong, sebelum pekerjaan itu diserahkan, sedangkan pihak yang memborongkan tidak telah lalai untuk memeriksa dan menyetujui pekerjaannya, maka si pemborong tidaklah berhak atas harga yang dijanjikan, kecuali apabila musnahnya barang itu disebabkan oleh sesuatu cacat dalam bahannya”.

Dari hak yang diperoleh oleh seorang kontraktor adalah sudah sesuai yaitu bahwa apabila terjadi kelalaian tetapi kelalaian tersebut diakibatkan karena pihak lain atau bukan dalam pekerjaan dari kontraktor tersebut maka bukan menjadi tanggungjawab dari kontraktor tetapi menjadi tanggungjawab dari konsumen sendiri apabila terjadi kerusakan.

Hak yang terdapat dalam Peraturan tersebut sudah sesuai pasalnya bahwa seorang kontraktor sebelum melakukan instalasi listrik maka dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu apakah sudah bisa dilakukan instalasi listrik atau belum kemudian setelah dipasang instalasi listrik juga dipasang apakah instalasi tersebut sudah dapat dialiri listrik atau belum dalam hal pemeriksaan ini dilakukan oleh yang berwenang.

b) Kewajiban Kontraktor

Kewajiban dari Biro Instalatir didalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1995 tentang Usaha Penunjang Listrik Pasal 10 disebutkan mengenai kewajiban dari Biro Instalatir:

- (1) *Pemegang izin bertanggungjawab atas pelaksanaan Usaha Penunjang Tenaga Listrik (Usaha Penunjang Listrik salah satunya adalah Biro Instalatir).*
- (2) *Dalam hal timbul kerugian akibat pekerjaan yang dilakukan dalam rangka Usaha Penunjang tenaga listrik, pemegang izin wajib memberikan ganti rugi.*

Kewajiban dari seorang pemborong sendiri adalah apabila terjadi kelalaian yang dilakukan oleh seorang pemborong maka harus memberikan ganti kerugian kepada konsumen atas sejumlah uang sesuai dengan kerugian yang diderita oleh seorang konsumen. Didalam perjanjian juga diberikan penjelasan bahwa seorang yang melakukan kelalaian maka harus memberikan ganti kerugian. Jadi

dalam perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak maka sudah sesuai.

C. Bentuk-bentuk tanggung jawab Cahaya Teknik Kab. Karanganyar sebagai Biro Instalasi, apabila terjadi kelalaian pada pemasangan instalasi listrik yang mengakibatkan kerugian pada pemakai tenaga listrik.

1. Tanggungjawab BTL atau Biro Tenaga Listrik pada instalasi Listrik Pelanggan yang telah dipasang

Didalam Pasal 1236 KUHPerdata disebutkan bahwa :

“Si berutang adalah wajib memberikan ganti biaya, rugi dan bunga kepada si berpiutang, apabila ia telah membawa dirinya dalam keadaan tak mampu untuk menyerahkan kebendaannya, atau telah tidak merawat sepatutnya guna menyelamatkannya”.

Jelas didalam pasal tersebut bahwa seseorang yang tidak dapat melakukan pekerjaannya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh seorang lain dalam hal ini keinginan dari seorang konsumen maka hendaknya seorang tersebut memberikan ganti kerugian kepada seorang lainnya. Sehingga tanggung jawab didalam perjanjian antara kedua belah pihak tersebut sudah sesuai.

2. Tanggungjawab kontraktor pada instalasi Listrik Pelanggan yang telah dipasang dalam hal teknis

a) Tanggungjawab sebelum pemasangan menyangkut bahan-bahan dan material yang digunakan

Didalam Pasal 1605 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa :

“Dalam halnya si pemborong diwajibkan memberikan bahunya dan pekerjaan dengan cara bagaimanapun musnah sebelumnya pekerjaan itu diserahkan, maka segala kerugian adalah atas tanggungan si pemborong, kecuali apabila pihak yang memborongkan telah lalai untuk menerima pekerjaan itu”.

Dalam pasal terbut jelas tercantum bahwa segala kerugian atas bahan-bahan yang akan digunakan untuk pekerjaan pemborongan akan menjadi tanggungjawab dari pihak pemborong. Pihak pemborong tidak boleh melimpahkan kerugian atas kelalaian yang digunakan dalam pemasangan instalasi listrik kepada konsumen.

- b) Tanggungjawab setelah pemasangan menyangkut pemasangan dari bahan-bahan atau titik yang akan dipasang.

Didalam Pasal 3 ayat (3) Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 437 K/30/MEM/2003 tentang Instalasi Ketengalistrikan yaitu :

“Rancangan berkas gambar Instalasi dan uraian teknik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dibuat sesuai ketentuan standar ketenagalistrikan, termasuk ketentuan mengenai keamanan Instalasi, keselamatan kerja dan keselamatan umum.”

Jadi berdasarkan uraian diatas bahwa perjanjian CV. Cahaya Teknik dengan konsumen didalam memberikan ganti kerugian atas kesalahan sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, pemasangan instalasi yang diakibatkan karena kelalaian didalam pemasangan instalasi listrik maupun kelalaian didalam rangkaian

instalasi listrik memberikan ganti rugi dengan cara mengganti dan mengubah rangkaian listrik tersebut dengan yang baru tanpa membebani daripada konsumen itu sendiri.

3. Tanggungjawab kontraktor karena kebakaran yang disebabkan oleh arus listrik

Pasal 11 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 437 K/30/MEM/2003 tentang Instalasi Ketengalistrikan yaitu

“Setiap orang karena kelalaiannya tidak memasang tanda-tanda pengaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) yang dapat mengakibatkan kecelakaan, kebakaran, dan atau matinya seseorang dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Jadi didalam ganti kerugian yang diakibatkan oleh adanya arus listrik tersebut berupa santunan kebakaran yang dilakukan kontraktor terhadap konsumen yang rumahnya mengalami kebakaran tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

- D. Upaya-upaya penyelesaian di luar Pengadilan akibat terjadinya kelalaian pada pemasangan instalasi listrik yang mengakibatkan kerugian pada pemakai tenaga listrik.

Bahwa didalam Pasal 1851 KUHPeradata yang menyebutkan bahwa

“Perdamaian adalah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara”.

Bahwa dalam perdamaian tersebut jelas yang dilakukan antara kontraktor dengan konsumen yaitu melakukan perdamaian atas masalah yang sedang timbul atau kelalaian tersebut. Bahwa dalam hal penyelesaian memilih menggunakan jalur non litigasi dalam bentuk negosiasi atau musyawarah secara kekeluargaan karena memang belum pernah terdapat kejadian yang luar biasa yang harus diselesaikan dengan menggunakan jalur Pengadilan. Bahwa jalur yang digunakan didalam melakukan penyelesaian sengketa tersebut.

E. Penutup

Kontruksi Hubungan Hukum antara CV. Cahaya Teknik sebagai Biro Instalatir dengan Pemakai Tenaga Listrik, adalah merupakan perjanjian pemborongan. Dalam hal ini sesuai dengan Pasal yaitu pada Pasal 1315, 1607, 1608 KHUPerdata, Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1989 tentang Penyediaan Pemanfaatan dan Pemakaian Tenaga Listrik Pasal 26 ayat (3), Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1995 tentang Usaha Penunjang Listrik dan sesuai juga dengan doktrin dari Yahya Harahap. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pemakai Tenaga Listrik Apabila Terjadi Kelalaian pada Pemasangan Instalasi Listrik yang Mengakibatkan Kerugian pada Pemakai Tenaga Listrik : sesuai dengan norma yaitu Pasal 1236, 1605 KUHPerdata, dan Pasal 3 ayat (3) Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 437 K/30/MEM/2003 tentang Instalasi Ketengalistrikan kemudian mengenai tanggungjawab apabila terjadi kebakaran sudah sesuai dengan Pasal 11 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 437 K/30/MEM/2003 tentang Instalasi Ketengalistrikan. Upaya penyelesaian di

luar Pengadilan dapat ditempuh oleh Biro Instalatir dan Pemakai tenaga listrik, adalah melalui jalur mediasi (negosiasi) karena prosesnya cepat dan mudah, biayanya murah, dan konsumen adalah golongan ekonomi menengah ke bawah. Sehingga semua kalangan akan lebih mudah didalam melakukan proses negosiasi atau musyawarah. Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitase.

Konsumen hendaknya mengerti hak dan kewajiban dalam kontrak sehingga apabila terjadi kelalaian maka konsumen dapat menuntut ganti kerugian yang seharusnya kepada Biro Instalatir dan sebaiknya pekerjaan pemeliharaan instalasi juga diserahkan kepada Biro Instalatir yang dulu memasang Instalasi Listrik tersebut agar pemberian ganti kerugian tetap berlaku. Biro Instalatir hendaknya memasang instalasi listrik dengan benar sesuai dengan standar peraturan yang berlaku, sehingga memberikan rasa aman bagi pemakai tenaga listrik agar dapat meminimalisir kemungkinan akan terjadinya kelalaian yang dapat merugikan konsumen. Biro uji KONSUIL hendaknya melakukan pengecekan setiap ada pemasangan instalasi listrik apakah sudah layak untuk dialiri listrik dan memenuhi standar dan keamanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Daftar Pustaka

1. Buku

Harahap, Yahya, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni.

Lexy, Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya Offset, Bandung.

Wignjosuebrotto, Soetandyo, *Silabus Metode Penelitian Hukum*, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya,

Widjaja, Gunawan, 2001, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Raja Grafindo Persada : Jakarta.

2. Peraturan Perundang-Undangan

KUHPerduta.

Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 2006 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik.

Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1995 tentang Usaha Penunjang Listrik

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0045 / 2005 tentang Instalasi Ketenagalistrikan.